

KEBIJAKAN POLITIK PERDANA MENTERI SUTAN SJAHRIR UNTUK MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN RI

Umar Sabiring, Syaiful M dan Suparman Arif

FKIP Unila Jalan. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

Telepon (0721) 704 947, faximile (0721) 704 624

e-mail: biring_expedition02@yahoo.co.id

Hp. 085768331646

The purpose of this research is to know and explain about the policy of Sutan Sjahrir diplomacy as prime minister to maintain the independence of republic of Indonesia. The method which used is historical method. The data collection techniques uses literature techniques and documentation techniques, to analyze data uses data qualitative analysis. The result of this research show that the politic policy of prime minister Sutan Sjahri to maintain the independence of republic of Indonesia in part of diplomacy politic produces linggarjati conferention on November 15, 1946 between government of republic Indonesia and government of Netherland in village of Linggarjati that signed on march 15, 1947 with result of 3 main point. Second conferention that is inter asia conferention which held in New Delhi on March,23,1947. Prime Minister of Sutan Sjahrir persuade that Asia did not show a block and keep a world in peace.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan kebijakan diplomasi Sutan Sjahrir sebagai Perdana Menteri untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode historis. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan dan teknik dokumentasi, untuk menganalisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan politik Perdana Menteri Sutan Sjahrir untuk mempertahankan kemerdekaan RI dalam bidang politik diplomasi yaitu dengan melahirkannya Konferensi Linggarjati tanggal 15 November 1946 antara pemerintah RI dengan Belanda di desa Linggarjati. Perundingan ini menghasilkan persetujuan Linggarjati yang ditandatangani tanggal 15 Maret 1947 dengan menghasilkan tiga poin pokok. Konferensi kedua yaitu konferensi Inter Asia yang diadakan di *New Delhi* pada tanggal 23 Maret 1947. Perdana Menteri Sutan sjahrir menggagas agar Asia tidak memihak kepada suatu blok, agar negara-negara Asia tidak ikut berperang dan ikut serta menjaga perdamaian dunia.

Kata kunci : diplomasi, kebijakan politik, konferensi

PENDAHULUAN

Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia di proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, para elit politik Indonesia mulai memikirkan cara mengisi kemerdekaan guna mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik materil maupun

sprituil yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

Salah satu tokoh politik yang sangat berpengaruh di hari-hari menjelang proklamasi kemerdekaan dan sesudahnya adalah Sutan Sjahrir. Ia adalah seorang arsitek terjadinya pergeseran sistem pada November 1945, yaitu dari Presidensial sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945 yang pertama

menjadi sistem Parlementer. Suatu pergeseran yang dicapai bukan melalui perubahan UUD melainkan dengan diterimanya konvensi yang menyatakan UUD akan berjalan di dalam sistem Parlementer. Selaku perdana menteri, Sjahrir adalah orang yang bertanggung jawab mengemudikan republik yang masih sangat muda pada saat itu dalam melewati bahaya yang mengelilinginya, dan ia berhasil meraih pengakuan dari dunia luar bagi kedaulatan Indonesia.

Sifat strategi Sjahrir sebagian terungkap dalam responnya terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Agustus 1945 dan sebagian dalam manuver-manuver politik berikutnya yang menempatkan dirinya pada kedudukan sebagai perdana menteri sejak 1945-1948, juga ketika pemerintahannya mendapatkan tekanan-tekanan dari dalam dan luar negeri. Sejumlah asas pedoman dapat kita lihat dalam tindakan-tindakannya selama periode itu, diantaranya ada yang merupakan perpanjangan atau revolusi pandangan itu dalam rangka situasi yang berkembang.

Pada akhir Oktober 1946, Sjahrir menerbitkan buklet kecil, dengan judul *Perjuangan Kita*, yang disebarakan selama hari-hari pertama pada November 1946. Buklet ini sangat mempengaruhi pemikiran politik Indonesia, terutama dikalangan buruh yang dulu ikut gerakan bawah tanah, dikalangan pemuda berpendidikan. Dalam buklet ini menyerukan para pemuda untuk bertindak dengan penuh tanggung jawab, berjuang dengan segenap jiwa revolusionernya, terutama menghindari kekerasan anti-asing dan anti-indo, dan mengerahkan kekuatan mereka ke arah pembentukan suatu pemerintah yang demokratis, non fasis serta non-feodalis. Sjahrir menyerukan agar rakyat Indonesia menolak semua pemimpin yang pernah aktif berkolaborasi dengan Jepang dan Belanda, dan mempercayakan kepemimpinan revolusi hanya kepada mereka yang tidak ternoda oleh hubungan semacam itu dari tujuan akhirnya adalah demokrasi, ia menyatakan: Revolusi kita harus di pimpin oleh kelompok-kelompok demokratis yang revolusioner. Dalam revolusi fisik, karier Sjahrir dibidang politik dan diplomasi bermula sejak keluarnya maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945,

dimana ia terpilih sebagai Ketua Badan Pekerja KNIP, disertai kekuasaan legislatif, untuk bersama-sama dengan presiden menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (Maeswara, Garda : 2010:44).

Sejak tanggal 14 November 1945 Sjahrir naik ke pucuk pimpinan pemerintah sebagai Perdana Menteri pertama Indonesia dalam usia 36 tahun, kepemimpinan Sjahrir berlangsung dalam 3 periode yaitu :

1. Kabinet pertama, yaitu 14 November 1945- 12 Maret 1946.
2. Kabinet kedua, 13 Maret 1946 – 2 Oktober 1946.
3. Kabinet ketiga, 2 Oktober 1946 – 27 Juni 1947.

Selama memimpin pemerintahan, Perdana Menteri Sutan Sjahrir memegang peranan penting, dari tahun 1945 hingga 1947, pengaruhnya sangat mendalam terhadap perjalanan revolusi Indonesia. Ia melakukan perundingan dengan pihak Belanda untuk menyelesaikan konflik antara Belanda dan Indonesia di bawah pengawasan Internasional, yaitu PBB. Sutan Sjahrir melaksanakan cara penyelesaian konflik yang berbeda dengan para tokoh revolusioner Indonesia pada saat itu seperti Tan Malaka dan yang lainnya. Di saat yang lain menyelesaikan persoalan konflik dengan Belanda melalui perlawanan militer (perang), Sjahrir justru memilih jalan damai yaitu diplomasi. Sjahrir berkesimpulan bahwa Indonesia harus mengakui kekuatan militer sekutu yang jauh lebih unggul. Jika penyelesaian konflik pasca kemerdekaan dilakukan dengan cara-cara militer maka Indonesia tidak akan bisa *survive* dan memenangkan pertempuran-pertempuran karena kelemahan persenjataan yang dimiliki Indonesia pada saat itu.

Langkah yang diambil Sjahrir sejak di serahi tampuk pemerintahan sebagai Perdana Menteri pada tanggal 14 November 1945 adalah berdiplomasi. Sjahrir berpendapat bahwa untuk mempertahankan kemerdekaan, Indonesia harus mengadakan perjanjian dengan Belanda agar mengakui berdirinya Indonesia (Buku Tempo, 2010: 75).

Sjahrir mengumumkan dalam diplomasinya Jakarta adalah kota internasional. Agar program ini menarik

perhatian dunia, digelarlah pameran kesenian yang di publikasikan oleh sejumlah wartawan luar negeri. Setelah itu Sutan Sjahrir mulai mengenalkan Indonesia di forum-forum Internasional, seperti Konferensi Asia di New Delhi pada 1946. Sjahrir memberikan bantuan kemanusiaan berupa sumbangan beras. Tidak semua setuju terhadap langkah Sjahrir berunding dengan bekas penjajah (Buku Tempo, 2010 : 75).

Kebijakan diplomasi yang dilakukan Sjahrir selama menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia merupakan cerminan dari pemikiran politik yang dia miliki. Sjahrir berpendapat bahwa dalam politik mempertaruhkan hidup adalah untuk memenangkan hidup (Rosihan Anwar, xiv:2011).

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan sebuah penelitian, metode merupakan faktor penting dalam memecahkan suatu masalah yang turut menentukan keberhasilan suatu penelitian. Metode merupakan cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan (Husin Sayuti, 1989 : 32).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian historis. “Metode penelitian historis adalah sekumpulan prinsip-prinsip aturan yang sistematis yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan secara efektif dalam usaha mengumpulkan bahan-bahan bagi sejarah, menilai secara kritis dan kemudian menyajikan suatu sintesa daripada hasil-hasilnya” (Nugroho Notosusanto, 1984 : 11).

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam pelaksanaan metode historis antara lain yakni heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi (Nugroho Notosusanto, 1984 : 84).

Variabel merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan begitu saja karena dengan variabel kita lebih dapat memfokuskan pada apa yang menjadi objek penelitian kita. Variabel adalah himpunan sejumlah gejala yang memiliki beberapa aspek atau unsur

didalamnya yang bersumber dari kondisi objek penelitian, tetapi dapat pula berada di luar dan berpengaruh pada objek penelitian (Nugroho Notosusanto, 1984 : 55).

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel tunggal dengan fokus penelitian pada apasaja kebijakan politik Perdana Menteri Sutan Sjahrir untuk mempertahankan kemerdekaan RI. Pengumpulan data selalu memiliki hubungan dengan dengan masalah yang hendak dipecahkan atau diteliti, dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik, hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang diinginkan agar lebih akurat, hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang diinginkan agar lebih akurat yakni dengan menggunakan teknik kepustakaan.

Teknik kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Mestika Zed, 2004 : 24).

Langkah yang harus ditempuh setelah pengumpulan data yaitu analisis data. Analisis data merupakan bagian penting dalam metode ilmiah, karena analisis data digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. “Analisis data yaitu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan. (Moeleong, 2004 : 280).

Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif mengingat data tersebut berupa fenomena-fenomena yang terjadi yang dikumpulkan dalam bentuk laporan dari karangan para sejarawan sehingga memerlukan pemikiran yang tepat dalam menyelesaikan masalah penelitian tersebut. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan

pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (*Bodgan dan Biklen*, 1982 dalam Moeleong, 2004 : 248).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah proklamasi kemerdekaan terjadilah pertempuran dan bentrokan-bentrokan antara pemuda-pemuda Indonesia melawan aparat Jepang. Tujuannya adalah untuk merebut kekuasaan guna menegakan kedaulatan republik serta memperoleh senjata. Aksi ini serentak dilakukan diseluruh kota maupun daerah diseluruh Indonesia. Keberanian ini muncul dikarenakan kondisi Jepang sudah kalah, keadaan terdesak dan sedang dalam posisi sulit. Di Jakarta para pemuda yang dipelopori oleh Komite Van Aksi 31 merencanakan untuk mengerahkan massa pada suatu rapat raksasa di Lapangan Ikada Jakarta, agar para pemimpin RI dapat berbicara di hadapan masa (Marwati Djoned Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1999:101).

Sekalipun rapat raksasa di Lapangan Ikada ini berlangsung hanya beberapa menit, namun berhasil mempertemukan Pemerintah Republik Indonesia yang baru berusia satu bulan dengan rakyat dan memberikan kepercayaan kepada bangsa ini untuk optimis segera dapat membangun bangsa ini menjadi lebih baik. Sementara itu di beberapa daerah di Indonesia terjadi perebutan kekuasaan, di beberapa Karesidenan di Jawa, para pemimpin di daerah menyambut proklamasi dengan menyatakan diri sebagai Pemerintah Republik Indonesia dan mengancam bahwa segala tindakan yang menentang pemerintah RI akan diambil tindakan keras.

Di Yogyakarta, perebutan kekuasaan secara serentak dimulai pada tanggal 26 September 1945. Sejak pukul 10 pagi semua pegawai instansi pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang dikuasai oleh Jepang mengadakan aksi pemogokan. Mereka memaksa orang-orang Jepang menyerahkan semua kantor mereka kepada orang-orang Indonesia. Pada tanggal 27 September 1945, KNI Daerah Yogyakarta mengumumkan bahwa kekuasaan di daerah itu telah berada di

tangan Pemerintah RI. (Marwati Djoned Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1999:103).

Di Bandung pertempuran diawali oleh usaha para pemuda untuk merebut pangkalan udara Andir dan pabrik bekas senjata (Artilerie Constructive Winkel, ACW), sekarang Pindad dan terus berlangsung sampai kedatangan pasukan Sekutu di kota Bandung pada 17 Oktober 1945. Di Semarang setelah para pemuda berhasil merebut kekuasaan, terjadi pertempuran dahsyat antara pemuda Indonesia melawan Jepang karena pihak Jepang merasa terancam oleh pemuda yang berusaha merebut senjata mereka. Pada tanggal 14 Oktober 1945, 400 tawanan Jepang dari pabrik gula Cepiring diangkut oleh pemuda –pemuda ke Semarang dengan rencana untuk menutupnya di Penjara Bulu, sebagian tawanan itu melarikan diri dan minta perlindungan kepada Batalyon Kido. Para pemuda menjadi marah dan mulai berebut dan menduduki kantor pemerintah. Pada keesokan harinya pasukan Jepang menyerbu kota Semarang dari tangsinya di Jatingaleh. Sejak hari itu terjadilah pertempuran yang berlangsung selama 5 hari dan karenanya terkenal dengan sebutan pertempuran Lima Hari di Semarang (Marwati Djoned Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1999:104).

Pada tanggal 28 Oktober 1945 terjadi pertempuran sengit antara pemuda dengan tentara Inggris yang menduduki gedung-gedung pemerintah di Surabaya, pertempuran ini ternyata tidak dapat diatasi oleh tentara Inggris yang kemudian meminta bantuan Bung Karno, “ atas undangan Jendral Cristison , Bung Karno terbang ke Surabaya pada tanggal 1945 untuk menghentikan pertempuran itu. Usaha Bung Karno itu berhasil. Pihak Indonesia dan Inggris mengadakan gencatan senjata (C.S.T. Kansil dan Julianto, 1990 :47).

Ditengah-tengah perlawanan bersenjata yang dilakukan rakyat, pemerintah RI justru bersikap lunak dengan menempuh perjuangan Diplomasi. Pada tanggal 1 November 1945 pemerintah mengeluarkan pernyataan politik tentang kesanggupan Indonesia untuk bekerjasama dengan setiap bangsa asing di dunia yang menghargai kemerdekaan

Indonesia dan pada tanggal 13 November 1945 pemerintah mengeluarkan maklumat bahwa RI akan menyelesaikan segala hal yang berhubungan dengan pendudukan sekutu dengan jalan damai. Perjuangan Diplomasi ini didasarkan atas pandangan Perdana Menteri Sjahrir mengenai kedudukan Indonesia sebagai negara muda yang masih sangat lemah pada waktu itu.

Dalam masyarakat Minangkabau pada umumnya merupakan penganut Islam yang kuat sehingga sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Minangkabau. Sehingga pengaruh Islam ini telah menyatu kedalam adat dan budaya Minangkabau hal ini dapat dilihat pada falsafah “Adat bersandi Syara, Syara bersandi Kitabulloh”. Selain pengaruh Islam, masyarakat Minangkabau merupakan tipe masyarakat dinamis dan anti Parokhialisme. Visi adat dan falsafah Minangkabau menuntut warganya terutama perantau untuk membandingkan dunia rantaunya dengan realitas alam asalnya, sehingga akan terlihat mana yang baik dan buruk diantara keduanya, dengan sendiri visi ini mendorong orang untuk berfikir kritis, dinamis atau dialektis dan menolak cara berfikir dogmatis atau parokhialisme. (Alfian, 1983 : 158).

Dengan adanya cirri budaya ini masyarakat Minangkabau lebih terbuka dan kritis dalam menerima nilai-nilai luar yang dibawa dari rantau yang tentunya saring dan sesuai dengan budaya setempat serta membuanghal yang buruk dari budaya sendiri sekaligus tetap mempertahankan dasar-dasar budaya. Pandangan budaya semacam ini membantu masyarakat Minangkabau dalam melihat pengalaman bukan sebagai suatu yang merusak, melainkan sebagai investasi dalam memperkaya adat dan budaya. Maka tidak mengherankan jika para intelektual Minangkabau “Modren” yang berpendidikan barat di penghujung abad ini dengan senang hati menerima pandangan ini dan menjadikan pemikiran tradisi Minangkabau yang dinamis dan anti- parokhialisme sebagai symbol-simbol budaya terpenting perjuangan mencapai emansipasi. Dari masyarakat Minangkabau yang seperti

inilah Suttan Sjahrir di lahirkan, Suttan Sjahrir merupakan intelektual Minangkabau yang senantiasa menjunjung tinggi visi budaya yang ada dalam masyarakat Minangkabau tersebut dengan pemikiran yang kritis ia berhasil mengintegrasikan antara pengalaman-pengalaman selama di rantau dengan alam Minangkabau dalam suatu cara pandang yang tak terpisahkan, pengalaman selama di rantau merupakan investasi dalam memperkaya pemikiran-pemikirannya sehingga pemikiran-pemikirannya yang ia hasilkan merupakan paduan antara ilmu pengetahuan yang ia dapat dengan kondisi objektif bangsanya.

Sutan Sjahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat, 5 Maret 1909. Ia adalah putra dari Moh. Rasad Gelar Maha Raja Sutan yang menjabat sebagai *Hoofd* atau Jaksa pada *Landraad* di Medan. Ibunya, Putri Siti Rabiah yang berasal dari Natal, daerah Tapanuli Selatan, ibunya berasal dari keluarga raja-raja lokal swapraja. Sjahrir mengenyam sekolah dasar (*Eurapes Lagerere School*) dan sekolah menengah (MULO) terbaik di Medan.

Sebagai ketua Badan Pekerja KNIP, Sjahrir ikut menetapkan garis-garis besar haluan Negara yang diwujudkan dalam Manifestasi politik I November 1945, yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Mohamrnad Hatta. Untuk melengkapi Manifestasi Politik di tingkat rakyat dan rnasyarakat, Syahir menulis “Perjuangan Kita”. Sebuah risalah peta persoalan dalam revolusi Indonesia sekaligus analisis ekonomi-politik dunia usai Perang Dunia II.

Perjuangan Kita muncul menyentak kesadaran. Risalah itu ibarat pedoman dan peta guna mengemudikan kapal Republik Indonesia di tengah badai revolusi. Tulisan-tulisan Sjahrir dalam Perjuangan Kita, membuatnya tampak berseberangan dan menyerang Soekarno. Jika Soekarno arnat terobsesi pada persatuan dan kesatuan, Sjahrir justru menulis ‘Tiap persatuan hanya akan bersifat taktis, temporer, dan karena itu insidental. Usaha-usaha untuk menyatukan secara paksa, hanva rnenghasilkan anak banci. (Pusat Dokumentasi Politik Guntur 49, Jakarta, 1945 : 11).

Persatuan semacam itu akan terasa sulit, tersesat, dan merusak pergerakan." Dan dia mengecam Soekarno. "Nasionalisme yang Soekarno bangun di atas solidaritas hierarkis, feodalistis: sebenarnya adalah fasisme, musuh terbesar kernajuan dunia dan rakyat kita" Dia juga mengkritik gaya agitasi massa Soekarno yang menurutnya tak membawa kejernihan.

Perjuangan Kita adalah karya terbesar Sjahrir, kata Salomon Tas, bersama surat-surat politiknya semasa pembuangan di Boven Digul dan Banda Neira. Manuskrip itu disebut Indonesianis Ben Anderson sebagai. "Satu-satunya usaha untuk menganalisa secara sistematis kekuatan domestik dan Internasional yang mempengaruhi Indonesia dan yang memberikan perspektif yang masuk akal bagi gerakan kemerdekaan di masa depan. Terbukti kemudian, pada November 1945 Sjahrir didukung pemuda dan ditunjuk Soekarno menjadi formatur kabinet parlementer. Pada usia 36 tahun, mulailah peran Sjahrir dalam panggung memperjuangkan kedaulatan Republik Indonesia, sebagai Perdana Menteri termuda di dunia, merangkap Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri

Suttan Sjahrir merupakan intelektual Minangkabau yang senantiasa menjunjung tinggi visi budaya yang ada dalam masyarakat Minangkabau tersebut dengan pemikiran yang kritis ia berhasil mengintegrasikan antara pengalaman-pengalaman selama di rantau dengan alam Minangkabau dalam suatu cara pandang yang tak terpisahkan, pengalaman selama dirantau merupakan investasi dalam memperkaya pemikiran - pemikirannya sehingga pemikiran-pemikirannya yang ia hasilkan merupakan paduan antara ilmu pengetahuan yang ia dapat dengan kondisi objektif bangsanya.

Pada tahun 1931, Sjahrir kembali ke tanah air dan terjun dalam pergerakan nasional. Sjahrir segera bergabung dalam organisasi Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru), yang pada Juni 1932 dalam kongres pertama Pendidikan Nasional Indonesia, Sjahrir terpilih sebagai ketua pimpinan umum partai yang bersifat

sebagai partai kader, bukan sebagai partai massa. Jumlah anggotanya pada waktu itu tidak lebih dari seribu orang. Sjahrir ketika itu berusia 23 tahun.

Ia menyusun suatu daftar pertanyaan yang berisi penjelasan tentang pengertian-pengertian mendasar yang harus dikuasai oleh anggota PNI-Baru dalam bentuk Tanya jawab. Maksudnya adalah, dengan penyebaran daftar pertanyaan yang dihafal oleh anggota PNI-Baru, maka mutu kecerdasan dan kesadaran politik anggota akan meningkat.

Pengalaman mencemplungkan diri dalam dunia proletariat ia praktekkan di tanah air. Sjahrir terjun dalam pergerakan buruh. Ia memuat banyak tulisannya tentang perburuhan dalam Daulat Rakyat. Ia juga kerap berbicara perihal teori perjuangan revolusioner di negeri Belanda menyebarkan pengetahuannya tentang sosialisme, perjuangan kerakyatan serta pergerakan buruh dalam forum-forum politik. Mei 1933, Sjahrir didaulat menjadi Ketua Kongres Kaum Buruh Indonesia.

Hatta kemudian kembali ke tanah air pada Agustus 1932, dan segera pula ia memimpin PNI Baru bersama Hatta, Sjahrir mengemudikan PNI Baru sebagai organisasi pencetak kader-kader pergerakan. Berdasarkan analisis pemerintahan kolonial Belanda gerakan politik Hatta dan Sjahrir dalam PNI Baru justru lebih radikal dibanding Soekarno dengan PNI-nya yang mengandalkan mobilisasi massa PNI Baru menurut polisi kolonial, cukup sebanding dengan organisasi Barat. Meski tanpa aksi massa dan agitasi secara cerdas, lambat namun pasti, PNI Baru mendidik kader-kader pergerakan yang siap bergerak ke arah tujuan revolusionernya.

Karena takut akan potensi revolusioner PNI Baru, Sjahrir, Hatta, dan beberapa pemimpin PNI Baru kemudian ditangkap, Hatta dibawa ke penjara Glodok, dan Sjahrir dibawa ke penjara Cipinang di Batavia. Dan mengalaminya pembuangan selama satu tahun yaitu dari tanggal 28 Januari 1935 sampai bulan Desember 1935 yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda hampir setahun ke Boven Digul di tengah hutan ganas, sungai penuh buaya, dalam kawasan

malaria di Papua. Sjahrir usianya waktu itu baru 25 tahun. Boven digul terkadang dinamakan kamp konsentrasi, seperti terdapat di Nazi Jerman dibawah rezim, kemudian Hatta dan Sjahrir dipindahkan ke Banda Neira Maluku, untuk menjalani masa pembuangan selama enam tahun. Di Banda mereka bertemu dengan keluarga dua pemimpin politik, yaitu dr. Tjipto Mangoenkoesoemo dan Mr. Iwa Koesoema Soemantri yang terlebih dahulu dibuang disana. Masa pembuangan dimanfaatkan oleh Sjahrir dengan membaca baik mengenai ekonomi, budaya maupun politik Ia mengikuti perkembangan dunia melalui surat-surat kabar yang terbit di Pulau Jawa dan Belanda.

Di Banda Neira Sjahrir banyak meningkatkan kesadaran pengetahuannya tentang perkembangan dunia dan sejarah kemanusiaan sambil mendidik dan mendewasakan dirinya sendiri dalam hubungan perkembangan dunia dan sejarah kemanusiaan. Mendidik dan memberikan pelajaran pada anak-anak merupakan kegiatan yang dilakukan Sjahrir sebagai teman dan penghibur dalam hidupnya di Pengasingan.

Masuknya tentara Jepang ke Indonesia pada bulan-bulan pertama, kedua dan ketiga tahun 1942 kelihatannya mendapat sambutan yang baik dari penduduk Indonesia. Tokoh-tokoh nasionalis Indonesia seperti Soekarno dan Hatta bersedia melakukan kerja sama dengan pihak pemerintah pendudukan Jepang, padahal sebelumnya pada masa pemerintah Hindia Belanda mereka bersikap nonkooperatif. Faktor-faktor yang menyebabkan kesediaan mereka bekerja sama itu adalah pertama, kebangkitan bangsa-bangsa timur. Faktor lainnya adalah tentang ramalan joyoboyo yang hidup dalam masyarakat tradisional. Dalam ramalannya bahwa akan datang orang-orang kate yang akan menguasai Indonesia selama seumur jagung dan sesudah itu kemerdekaan akan tercapai. Faktor lainnya adalah kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. (Poesponegoro, Marwati Djoened, 2008, hal. 27).

Sesudah Sjahrir dan Hatta dibebaskan oleh Jepang Maret 1912, Sjahrir mengambil

keputusan dengan pasti tidak akan bekerja sama dengan Jepang. Sementara Soekarno dan Hatta menjalin kerja sama dengan Jepang, Sjahrir membangun jaringan gerakan bawah tanah anti-fasis. Sjahrir yakin Jepang tak mungkin memenangkan perang, oleh karena itu, kaum pergerakan mesti menyiapkan diri untuk merebut kemerdekaan di saat yang tepat. Simpul-simpul jaringan gerakan bawah tanah kelompok Sjahrir adalah kader-kader PNI Baru yang tetap meneruskan pergerakan.

Situasi objektif itu pun makin terang ketika Jepang makin terdesak oleh pasukan Sekutu. Sjahrir mengetahui perkembangan Perang Dunia dengan cara sembunyi-sembunyi mendengarkan berita dari stasiun radio luar negeri. Kala itu, semuaradio tak bisa menangkap berita luar negeri karena disegel oleh Jepang. Berita-berita tersebut kemudian ia sampaikan ke Hatta.

Sembari itu Sjahrir menyiapkan gerakan .bawah tanah itulah untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang. Sjahrir yang didukung para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 15 Agustus karena Jepang sudah menyerah, Sjahrir siap dengan massa gerakan bawah tanah untuk melancarkan aksi prebutan kekuasaan sebagai simbol dukungan rakyat.

Pada Desember 1942 diadakan persiapan pembentukan suatu organisasi rakyat Indonesia yang dipimpin oleh Ir. Soekarno. Pada tanggal 1 Maret 1942 ia mengumumkan lahirnya organisasi baru yang bernama Poesat Tenaga Rakyat yang disingkat Poetra.

Tujuan organisasi ini menurut Soekarno adalah untuk membangkitkan kembali semangat kebangsaan rakyat Indonesia yang selama masa kolonial Belanda berhasil dibendung oleh Hindia Belanda. Namun, bagi Jepang sendiri poetra adalah wadah untuk rakyat Indonesia dalam membantu mereka berperang dalam usaha mempertahankan perang Asia Raya. Sjahrir sejak semula yakin Jepang tidak dapat memenangi peperangan. Dengan mengikuti perkembangan politik dunia dan jalannya perang melalui radio gelap, Sjahrir dapat member informasi diseluruh Pulau Jawa sehingga dia dapat meningkatkan persiapan

menggerakkan golongan-golongan yang anti Jepang dan yang prodemokrasi untuk member pukulan pada waktu yang tepat. Kekalahan Jepang yang dipercepat oleh bom atom yang dijatuhkan di kota Hiroshima dan tiadanya persiapan sekutu untuk cepat-cepat memasuki kawasan Asia Tenggara memberi suatu kesempatan untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia sehingga tuntutan Indonesia dapat dilaksanakan oleh suatu gerakan politik saja, melainkan oleh suatu Negara yang sudah menyatakan kemerdekaannya.

Soekarno dan Hatta yang belum mengetahui berita menyerahnya Jepang, tidak merespon secara positif. Mereka menunggu keterangan dari pihak Jepang yang ada di Indonesia, dan proklamasi itu mesti sesuai prosedur lewat keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dibentuk oleh Jepang. Sesuai rencana PPKI, kemerdekaan akan diproklamasikan pada 24 September 1945. Sikap Soekarno dan Hatta tersebut mengecewakan para pemuda sebab sikap itu berisiko kemerdekaan RI dinilai sebagai hadiah Jepang dan RI adalah buatan Jepang, Guna mendesak lebih keras, para pemuda akhirnya menculik Soekarno dan Hatta pada 16 Agustus. Dan kemudian, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan RI pada 17 Agustus.

Sejak dimanahkan menjadi Ketua Badan Pekerja KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) pada tanggal 17 Oktober 1945. Amir Sjarifudin, wakil ketuanya, berdasarkan Makloemat X tertanggal 16 Oktober 1945, KNIP di ubah dari sebuah badan pembantu Presiden menjadi legislatif, parlemen. Para menteri bertanggung jawab kepada parlemen sementara (sebelum diadakan pemilihan umum) yakni KNIP, Makloemat X ditandatangani oleh Wakil presiden Hatta; disebut Makloemat, karena Sekretaris Negara tidak ingat nomor urut yang dicantumkan, sedangkan waktu mendesak.

Pemerintah Soekarno didesak mengeluarkan makloemat 3 November 1945, yang mendirikan partai politik dan dengan demikian dan dengan demikian menghapus kesan bahwa republik Indonesia adalah negara fasis (Rosihan Anwar: 51-52). Sutan Sjahrir

terpilih menjadi perdana menteri 3 periode yaitu:

Sikap pemerintah menempuh perjuangan Diplomasi mendapat tanggapan pro dan kontra dari para pejuang saat itu, mereka yang mendukung kebijaksanaan ini pada umumnya sependapat dengan pandangan yang dikemukakan pemerintah sedangkan mereka yang kontra menganggap bahwa kebijakan ini akan membahayakan kemerdekaan dan keutuhan wilayah RI karena hal ini akan lebih menguntungkan pihak Belanda dalam menyusun kekuatan militernya untuk menguasai Indonesia.

Sebagai konsekuensi logis di tempuhnya Diplomasi pemerintah menganggap perlu menghentikan perlawanan-perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh tentara Indonesia maupun laskar-laskar bersenjata yang saat itu dengan perintah penghentian pertempuran-pertempuran seperti yang terjadi di Surabaya, dan daerah-daerah lainnya. Perintah untuk menghentikan perlawanan bersenjata ini menimbulkan polemik tersendiri pada pemimpin tentara maupun badan-badan perjuangan bersenjata sehingga konsentrasi perjuangan bersenjata menjadi terganggu dan akibatnya banyak daerah-daerah yang jatuh ketangan Sekutu dengan mudahnya.

Sejak di amanahkan menjadi Ketua Badan Pekerja KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) pada tanggal 17 Oktober 1945. Amir Sjarifudin, wakil ketuanya, berdasarkan Makloemat X tertanggal 16 Oktober 1945, KNIP di ubah dari sebuah badan pembantu Presiden menjadi legislatif, parlemen. Para menteri bertanggung jawab kepada parlemen sementara (sebelum diadakan pemilihan umum) yakni KNIP, Makloemat X ditandatangani oleh Wakil presiden Hatta; disebut Makloemat, karena Sekretaris Negara tidak ingat nomor urut yang dicantumkan, sedangkan waktu mendesak. Pemerintah Soekarno didesak mengeluarkan makloemat 3 November 1945, yang mendirikan partai politik dan dengan demikian dan dengan demikian menghapus kesan bahwa republik Indonesia adalah negara fasis (Rosihan Anwar: 51-52). Sutan Sjahrir terpilih menjadi perdana menteri 3 periode yaitu:

1. Kabinet pertama, yaitu 14 November 1945- 12 Maret 1946.
2. Kabinet kedua, 13 Maret 1946 – 2 Oktober 1946.
3. Kabinet ketiga, 2 Oktober 1946 – 27 Juni 1947.

Terbentuknya kabinet Sjahrir Kabinet pertama, yaitu 14 November 1945- 12 Maret 1946 yaitu kabinet Parlementer yaitu para menteri diangkat dari partai politik.

Kabinet ini memiliki program kerja sebagai berikut:

1. Menyempurnakan susunan pemerintah daerah berdasarkan kedaulatan rakyat.
2. Mencapai koordinasi segala tenaga rakyat di dalam usaha menegakan negara Republik Indonesia serta pembangunan masyarakat yang berdasarkan keadilan perikemanusiaan.
3. Berusaha untuk memperbaiki kemakmuran rakyat, di antaranya dengan jalan pembagian pangan.
4. Berusaha mempercepat keberesan tentang uang Republik Indonesia.

Para pejabat yang masuk dalam jajaran kabinet sjahrir I. yaitu:

1. Perdana Menteri Sutan Sjahrir (PSI)
2. Menteri Luar Negeri Sutan Sjahrir (PSI)
3. Menteri Dalam Negeri Sutan Sjahrir (PSI)
4. Wakil Menteri Dalam Neger Mr. Haermani
5. Menteri Keamanan Rakyat Amir Sjarifudin (PSI)
6. Wakil Menteri Keamanan Rakyat Abdul Moerad
7. Menteri kehakiman Mr. Soewandi
8. Menteri Penerangan Amir Sjarifudin (PSI)
9. Menteri Keuangan Soenarjo Kolopaking
10. Menteri Kemakmuran Ir. Darmawan Mangonkoesoemo
11. Menteri Perhubungan Ir. Abdul Karim
12. Menteri Pekerjaan Umum Ir. Putuhena (Parkindo)
13. Menteri Sosial Dr. Adji Darmo Tjokronegoro (PSI)
14. Menteri Pengajaran Dr. Mr. TSG. Mulia (Parkindo)
15. Menteri Kesehatan Dr. Darma Setiawan
16. Menteri Negara H. Rasjidi (Masyumi)

(Garda maeswara : 57-58).

Pada tanggal 12 Maret 1946, terbentuknya kabinet II. Kabinet ini memiliki 6 program kerja sebagai berikut:

1. Republik Indonesia harus diakui sebagai negara yang berdaulat penuh atas wilayah bekas Hindia Belanda.
2. Pinjaman-pinjaman Belanda sebelum tanggal 8 Maret 1942 menjadi tanggung jawab pemerintah RI.
3. Federasi Indonesia-Belanda akan dilaksanakan dalam masa tertentu dan mengenai urusan luar negeri dan pertahanan di serahkan kepada suatu badan federasi yang terdiri atas orang Indonesia dan Belanda.
4. Tentara Belanda segera ditarik dari Indonesia dan jika perlu diganti dengan Tentara Republik Indonesia.
5. Pemerintah Belanda harus membantu pemerintah Indonesia untuk dapat diterima sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Selama perundingan, semua aksi militer harus dihentikan dan pihak Republik akan melakukan pengawasan terhadap pangungsi tawanan-tawanan Belanda dan interniran lainnya.

Para Pejabat Yang Masuk Dalam Jajaran Kabinet Sjahrir II. yaitu:

1. Perdana Menteri Sutan Sjahrir (PSI)
2. Menteri Muda Luar Negeri H. Agus Salim
3. Menteri Dalam Negeri Dr. Subandrio (Partai Sosialis) dan Menteri Pertahanan Mr. Amir Sjarifudin (Partai Sosialis)
4. Menteri Muda Pertahanan Arudji Kartawinata (Masyumi) dan Menteri Kehakiman Soewandi
5. Menteri Muda Kehakiman Mr. Hadi dan Menteri Penerangan Mohamad Natsir (Masyumi) dan Menteri Keuangan Ir. Soerachman Tjokrodisuro dan Menteri Muda Keuangan Mr. Sjaripudin Prawinegara (Masyumi)
6. Menteri Perhubungan Ir. Abdul Karim
7. Menteri Muda Perhubungan Ir. Djuanda dan Menteri Pekerjaan Umum Ir. Puteha (Parkindo) dan Menteri Muda Pekerjaan Umum Ir. H. Laoh (PNI)
8. Menteri pertanian dan persedian Ir. Rasad
9. Menteri perdagangan dan perindustrian Ir. Darmawan.

10. Menteri Perhubungan/Menteri Sosial Mr. Maria Ulfa
11. Menteri Muda Sosial Mr. Abdulmajid (partai sosial)
13. Menteri Agama H. Rasid (Masyumi)
14. Menteri Kesehatan Dr. Darma Setiawan
15. Menteri Muda Kesehatan Dr. J. Leimana (Parkindo)
16. Menteri Negara Wikaya (BP Kongres).

(Garda maeswara : 85-88).

Melanjutkan Kabinetnya kedua, Sjahrir membuat program untuk Kabinetnya ketiga, yaitu:

1. Menyempurnakan susunan pemerintah daerah berdasarkan kedaulatan Rakyat.
2. Mencapai koordinasi segala tenaga rakyat di dalam usaha Menegakan Negara Republik Indonesia.
3. Serta pembangunan masyarakat yang berdasarkan keadilan dan perikemanusiaan.
4. Berusaha untuk memperbaiki kemakmuran rakyat di antaranya dengan jalan pembagian pangan.
5. Berusaha mempercepat keberesan tentang hal uang Republik Indonesia.

Para Pejabat Yang Masuk Dalam Jajaran Kabinet Sjahrir III. yaitu:

1. Perdana Menteri Sutan Sjahrir
2. Menteri Luar Negeri Sutan Sjahrir
3. Menteri Muda Luar Negeri Haji Agus Salim
4. Menteri Dalam Negeri M. Mohamad Rum (Masyumi)
5. Menteri Pertahanan Mr. Amir Sjarifudin (Partai Sosialis)
6. Menteri Muda Pertahanan Harsono Tjokroaminoto (Masyumi)
7. Menteri Kehakiman Mr. Sutanto (PNI)
8. Menteri Muda Kehakiman Mr. Hadi
9. Menteri Penerangan Mohamad Natsir (Masyumi)
10. Menteri Keuangan Mr. Sjafrudin Prawinegara
11. Perdana Muda Keuangan Mr. Lukman Hakim (PNI)
12. Menteri Kemakmuran Dr. Adnan Kapau Gani (PNI)
13. Menteri Muda Kemakmuran M. Jusuf Wibisono (Masyumi)
14. Menteri Perhubungan Ir. Djuanda

15. Menteri Muda Perhubungan Stiadjid (Masyumi)
16. Menteri Pekerjaan Umum Ir. Putuhena (Parkindo)
17. Menteri Muda Pekerjaan Umum Ir. H. Laoh (PNI)
18. Menteri Sosial Mr. Maria Ulfah (Perwari/PPI)
19. Menteri Muda Sosial Mr. Abdulmadjid Djojoningrat
20. Menteri Pengajaran Mr. Suwandi
21. Menteri Muda Pengajaran Ir. Gunarso
22. Menteri Agama K. Haji Fatucrahman (Masyumi)
23. Menteri Kesehatan Dr. Darma Setiawan
24. Menteri Kesehatan Dr. J. Leimana (Parkindo)
25. Menteri Negara Sri Sultan Hamengkubowono IX
26. Menteri Negara K. Haji Wachid Hasjim (Masyumi)
27. Menteri Negara Wikana (BP Kongres Pemuda)
28. Menteri Negara Dr. Sudarsono (Partai Sosialis)
29. Menteri Negara Mr. Tan Po Gwan (Partai Sosialis)
30. Menteri Negara Dr. Ernest Francois Eugene DK.

. Sementara usaha Diplomasi yang dilakukan pemerintah terus berlangsung. Belanda telah berhasil menyusun kekuatan militernya guna mengambil alih kekuasaan setelah Sekutu meninggalkan Indonesia. Diplomasi ternyata dimanfaatkan Belanda untuk mengulur waktu sampai kekuatan militer mereka siap (A.H. Nasution, 1997 :28).

Dengan kekuatan militernya ini Belanda mulai melancarkan operasi-operasi militer untuk menguasai daerah-daerah di Indonesia. Pada tanggal 15 November 1946 di adakan perundingan antara pemerintah RI dengan Belanda di Desa Linggarjati, perundingan ini menghasilkan Persetujuan Linggarjati yang ditandatangani pada tanggal 15 Maret 1947, berselang empat bulan Persetujuan Linggarjati ditandatangani pada tanggal 20 Juli 1947 Belanda melakukan Agresi Militer pertama terhadap RI yang didahului ultimatum supaya RI mengakui kedaulatan Belanda di Indonesia pada tanggal 29 Juni 1947.

Agresi Militer Belanda ini merupakan penghianatan terhadap upaya Diplomasi yang bertujuan untuk melemahkan dan menguasai secara penuh atas wilayah RI. Rakyat Indonesia melakukan perlawanan gerilya secara serentak diseluruh wilayah RI dan berhasil mendesak kedudukan Belanda.

Tindakan Agresi Belanda ke-II mengakibatkan reaksi dimana-mana, di dalam negeri kabinet Negara Pasundan dan NIT meletakkan jabatan sebagai protes, sedangkan di luar negeri simpati terhadap Indonesia semakin besar dan membangkitkan Negara-negara Asia dan PBB untuk mengadakan tindakan.

Terbentuknya Perjanjian Linggarjati tentunya tidak dapat dilepaskan dari latar belakang dunia internasional dan nasional. Keadaan dunia pasca Perang Pasifik dapat dikatakan masih belum stabil. Kebijakan dibidang politik ini diawali dengan dikumpulkannya para tokoh nasional untuk memimpin pertarungan diplomasi dengan pihak Belanda. Maka Perdana Menteri Sutan Sjahrir mengundang dan mengumpulkan tokoh-tokoh nasional dikediamannya. Tokoh tersebut adalah Mohammad Roem, (Menteri Dalam Negeri), Mr. Soesanto Tirtoprodjo (Menteri kehakiman) , dan dokter Soedarsono (Menteri Negara).

Dengan tujuan untuk merumuskan sebuah gagasan atau ide dalam sebuah Perundingan Paskah dicapainya persetujuan gencatan senjata antara pihak Indonesia dan Belanda apakah melakukan sebuah politik dengan menggunakan politik Diplomasi menurut pemerintah atau Konfrontasi menurut pihak tokoh oposisi pada saat itu.

Adapun hasil dari pertemuan tersebut para tokoh tersebut adalah melakukan sebuah politik Diplomasi sesuai dengan kebijakan pemerintah, kemudian merancang sebuah persiapan untuk menghadapi sebuah perundingan sehingga nanti tidak akan merugikan negara Indonesia (K.M.L. Tobing, 1986:VIII).

Dengan adanya sebuah perundingan kebijakan dibidang politik ini lahir dikarenakan kekuatan Indonesia pada saat itu yang tidak seimbang dengan kekuatan Sekutu maka di ambillah sebuah kebijakan untuk melakukan perundingan dengan Sekutu.

Disini Sutan Sjahrir juga berperan dan bertanggungjawab untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan mengajak ketiga tokoh nasional untuk melakukan diplomasi sehingga melahirkan sebuah Perjanjian Linggarjati (Rosihan Anwar, 2010 :87).

Berawal dari sebuah gagasan Perdana Menteri Sutan Sjahrir melakukan diplomasi beras yang aktif di mulai sejak April 1946. Sjahrir tetap bersikukuh untuk mengirimkan 500.000 ton beras ke India yang sedang dilanda bencana kelaparan. Sebagai gantinya beras tersebut ditukar dengan obat-obatan dan tekstil. Jawaharlal Nehru, yang terpukau oleh uluran tangan Sjahrir, lantas mengadakan *Asians Relations Conference* di New Delhi dan mengundang Sjahrir. Diplomasi ini ternyata membawa dampak positif bagi Indonesia. Selain mendapatkan “kawan”, Indonesia dinilai semakin eksis dalam pergaulan Internasional. Atas prakarsa Pandit Jawarhal Nehru, diadakan *inter Asian Conference di New Delhi, India* pada tahun 1947 (Rosihan Anwar, 2010: 103).

Konfrensi ini dihadiri oleh Negara-negara Asia yang bertujuan untuk menggalang kerjasama di antara Negara-negara Asia dalam mencapai tujuan bersama, khususnya kemerdekaan, keamanan, dan kesejahteraan manusia. Indonesia mengirimkan delegasi lengkap yang dipimpin oleh P.M. Suttan Sjahrir dan H. Agus salim. Saat berbicara dalam Konfrensi Hubungan Asia pada tanggal 23 Maret 1947 di New Delhi, India, Sarojinaidu (1879-1949) mengenalkan Sutan Sjahrir sebagai ‘Perdana Menteri atom’ *the atomic prime minister*.

Banyaknya perlawanan bersenjata di daerah-daerah oleh rakyat RI dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan akan lebih banyak lagi korban yang berjatuhan maka Perdana Menteri Sutan Sjahrir menggunakan cara lunak yaitu dengan cara diplomasi dan melakukan perundingan-perundingan dengan pihak Sekutu, hal ini disebabkan karena masih lemahnya dalam tehnik persenjataan kemiliteran dan perlunya mendapat simpati dan opini dunia internasional. Adapun Perundingan yang dilakukan pemerintah dengan Sekutu yaitu dalam mengantisipasi terjadinya gencatan

senjata.yaitu melakukan Perundingan Linggarjati. Pada tanggal 15 November 1946 diadakan perundingan antara pemerintah RI dengan Belanda di Desa Linggarjati, perundingan ini menghasilkan Persetujuan Linggarjati yang ditandatangani pada tanggal 15 Maret 1947. Isi naskah pada pokoknya adalah : Pemerintah Belanda mengakui kekuasaan *de facto* Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera, Pemerintah Indonesia dan Belanda akan mendirikan Negara Indonesia Serikat dan Negara Indonesia Serikat dihubungkan dengan Belanda dalam satu uni Indonesia-Belanda.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis, bahwa dengan diadakan *Inter Asia Conference di New Delhi* pada tanggal 23 Maret 1947 yang di hadiri oleh Negara-negara Asia yang bertujuan untuk menggalang kerjasama di antara Negara-negara Asia dalam mencapai tujuan bersama, khususnya kemerdekaan, keamanan, dan kesejahteraan manusia. Maka Perdana Menteri Sutan Sjahrir menggalang sebuah pemikiran, agar Asia tidak memihak kepada suatu blok.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Rosihan. 2011. *Sutan Sjahrir, Negarawan Humanis, Demokrat Sejati Yang Mendahului zamannya*. Jakarta. Buku Kompas.
- Anwar,Rosihan 2010. *Sjahrir, Peran Besar Bung Kecil*. Jakarta. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Kansil Dan Julianto. 1990. *Sejarah Pergerakan Kebangsaan Indonesia*. Jakarta. Gramedia.
- Maeswara, Garda. 2010. *Sejarah Revolusi Indonesia 1945-1950*. Jakarta. Narasi.
- Moeleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, A.H. 1997. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid III*. Bandung. Angkasa.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan maka penulis dapat diambil kesimpulan bahwa strategi yang dilakukan perdana menteri Sutan Sjahrir dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah melakukan politik diplomasi dengan cara melakukan sebuah perundingan dengan pihak sekutu. Maka melahirkan sebuah perundingan Linggarjati yang menghasilkan sebuah tiga pokok bahasan yang berisi Pemerintah Belanda mengakui kekuasaan *de facto* Republik Indonesia meliputi Sumatera, Jawa dan Madura, Pemerintah Indonesia dan Belanda akan mendirikan Negara RIS serta Negara Indonesia Serikat dihubungkan dengan Belanda dalam satu uni Indonesia-Belanda, yang disetujui kedua belah pihak negara dan ikut menghadiri konferensi Inter Asia dengan tujuan untuk menggalang kerjasama antara Negara-negara Asia dalam mencapai tujuan bersama, khususnya kemerdekaan, keamanan, dan kesejahteraan manusia. tanggal 23 Maret 1947 di New Delhi, India.

- Notosusanto, Nugroho. 1984. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta. Inti Indayu.
- Notosusanto, Nugroho. 1984. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer suatu pengalaman*. Jakarta. Intidayu Press.
- Poesponegoro, Marwati Djoned dan Notosusanto, Nugroho. 1999. *Sejarah Nasional Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Sayuti, Husin.1989. *Pengantar Metodologi Riset*. Jakarta. CV. Fajar Agung
- Tobing, K.M.L. 1986. *Perjuangan politik bangsa indonesia linggarjati*. Jakarta. Gunung Agung
- Zed, Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.